

SKRIPSI



EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH :

**AFRIYANDI RAMADHAN NAIM
B111 08 994**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

AFRIYANDI RAMADHAN NAIM

B111 08 994

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disusun dan diajukan oleh
AFRIYANDI RAMADHAN NAIM

B 111 08 994

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa Tanggal 28 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP . 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

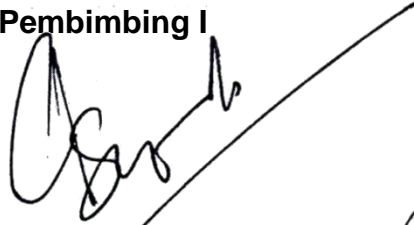
Nama : **AFRIYANDI RAMADHAN NAIM**
Nomor Pokok : **B 111 08 994**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Seminar Hasil

Makassar, 04 April 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
NIP . 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

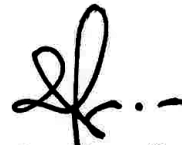
Nama : **AFRIYANDI RAMADHAN NAIM**
Nomor Pokok : **B 111 08 994**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul skripsi : **EKSISTENSI PIDANA DENDA DALAM KONTEKS
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 4 April 2013

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AFRIYANDI RAMADHAN NAIM (B 111 08 994) Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penulisan Skripsi ini (dibimbing oleh Aswanto selaku pembimbing I dan Nur Azisa selaku pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana denda serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkhusus pidana denda.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, metode penelitian Kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian antara lain : bahwa Penerapan pidana denda dalam pemidanaan di Indonesia belum maksimal. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal karena pengak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum, hal ini juga dikarenakan minimnya jumlah pidana denda yang diancamkan. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan pada Allah SWT atas rahmat dan KaruniaNya yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Eksistensi Pidana Denda Dalam Konteks Kitab Undang-undang Hukum Pidana “ dengan kesabaran dan kesehatan yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtuaku, Drs. Abdul Mannan Naim dan Fitri Yanti yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang serta perhatian dan membiayai penulis sampai selesainya studi penulis. Istri dan
2. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH., MH., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum.

4. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH., MH., DFM. dan Ibu Hj. Nur Azisa SH., MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Winner Sitorus SH., MH selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis.
6. Sahabat terbaik penulis : Ismail Achmad SH., Yang telah membantu penulis dari awal pembuatan skripsi ini hingga sekarang.
7. Semua teman-teman di Commercial Team Trans Studio yang telah memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman KKN khususnya Posko Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN sampai sekarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen Hukum Pidana
10. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis.
11. Dan seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan perhatiannya dalam penyusunan karya tulis ini dengan limpahan rahmat-Nya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf bila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan penulisan, dimana kesemuanya itu dating dari penulis sebab penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pidana dan Pemidanaan	8
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	8
2. Tujuan dan Teori Pemidanaan.....	11
3. Jenis-jenis Pemidanaan.....	20
4. Prinsip Penjatuhan Pidana menurut KUHP.....	23
B. Definisi dan Lahirnya Pidana Denda.....	24
C. Perkembangan Pidana Denda di Indonesia.....	26
D. Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara.....	28
E. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia.....	30

BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
D. Analisis Data	34
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 35
A. Eksistensi Pidana Denda dalam Konteks Pemidanaan Di Indonesia.....	36
B. Penerapan Pidana Denda di Pengadilan Negeri Makassar.....	49
 BAB V PENUTUP.....	 51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam kasus tertentu. Dalam Pasal 52 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1992 disebutkan pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim, antara lain :

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Pedoman pemidanaan ini akan sangat membantu Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga hal ini akan memudahkan Hakim dalam menerapkan takaran pemidanaan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana pokok yang terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan yang terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dari beberapa jenis pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang paling menderitakan adalah pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan, namun demikian dari jenis-jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP jenis pidana yang merupakan perampasan kemerdekaan yang paling banyak diancamkan baik secara tunggal maupun secara alternatif, serta dengan waktu tertentu maupun seumur hidup.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus

dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, dalam perkembangannya, nilai besaran dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, dan hal inilah yang mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.

Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara atau kurungan tetap merupakan yang utama. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana perampasan kemerdekaan namun suatu kenyataan bahwa pidana perampasan akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling bertentangan terhadap tujuan dari perampasan kemerdekaan (penjara), yang antara lain sebagai berikut :

- (1) Bahwa tujuan penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi.
- (2) Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif didalam pergaulan masyarakat.

Oleh sebab itu sekalipun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian, narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja.

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidanapenjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat lebih memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan Hakim. Seringkali antara

masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Dengan demikian sampai saat ini keberadaan pidana perampasan kemerdekaan tetap ada atau sulit dihindari, meskipun kerugian-kerugian yang melekat padanya. Pada masa mendatang pidana perampasan kemerdekaan tetap merupakan pendukung dari sistem peradilan pidana. Yang penting adalah seberapa jauh penggunaan pidana perampasan kemerdekaan dapat dibatasi sehingga dapat keserasian, keselarasan dan keseimbangan penggunaannya dengan pidana non kemerdekaan.

Penjatuhan pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang dapat digunakan serta keberadaannya yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP bisa dimaksimalkan walaupun keberadaannya jarang dijatuhkan oleh para Hakim. Pidana denda merupakan jenis pidana tertua di dunia yang mengacu kepada Kitab Taurat dan Al-Qur'an disamping pidana mati. Selain itu juga dalam hukum adat justru tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan, namun justru lebih dikenal pidana berupa pembayaran baik kepada penguasa (kerajaan) maupun sebagai pengganti kerugian kepada korban. Bentuk pembayaran ini mulai dari bentuk uang sampai bentuk ternak, hasil kebun dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Eksistensi Pidana Denda dalam konteks pembedaan di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan Pidana Denda di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang mendasari penyusunan skripsi ini adalah untuk:

- 1) Mengetahui bagaimana eksistensi pidana denda dalam konteks pembedaan di Indonesia
- 2) Mengetahui bagaimana penerapan Pidana Denda di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan adalah :

- 1) Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
- 2) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum yang pada umumnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

- 3) Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dalam bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Didalam hukum pidana modern, pidana juga meliputi apa yang disebut “tindakan” (tata tertib).¹

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan *istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana*.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Dalam hukum pidana kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal-hal yang sehari-hari dilimpahkan². Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang

¹ A.Fuad Usfa, 2006, ***Pengantar Hukum Pidana***, UMM, Malang, hal 2

² Moeljatno, 1993, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, hal 1

dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana³. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat.⁴

Dari pengertian Pidana, Hukum Pidana, dan Tindak Pidana diatas dapat kita lihat bahwa dalam suatu tindak pidana akan menimbulkan suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang dan untuk itu dalam setiap penjatuhan pidana diperlukan hukum yang mengaturnya.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan

³ P.A.F.Lamintang, 1997, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 181

⁴ Chairul Huda, 2008, ***"Dari 'TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN' Menuju Kepada 'TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN'" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana***, Kencana Prenada, Jakarta, hal 26

kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan dapat diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim⁵. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2003, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 136

Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah *cepat, sederhana, dan biaya ringan*. Di dalam proses pemidanaan, untuk orang dewasa tunduk sepenuhnya pada KUHP dan peraturan pelaksanaannya. Bagi anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan perlakuan khusus terhadap anak bukan berarti orang dewasa dapat diperlakukan sewenang-wenang. Perlakuan terhadap orang dewasa yang terlibat tindak pidana (tersangka, terdakwa, atau terpidana) tetap berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana maka yang bersangkutan tetap mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi.⁶

2. Tujuan dan Teori Pemidanaan

Pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas makna pidana dan tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Jadi, antara pidana dan tujuan

⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 35

penjatuhannya mempunyai kaitan yang strategis, juga sifat dan bentuk pidananya.⁷

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.⁸

Tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan sejarah, dapat dihimpun sebagai berikut:

(1) Pembalasan (*revenge*)

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain. Di dalam masyarakat primitif, tujuan pemidanaan yang lebih menonjolkan aspek pembalasan ini sering terjadi, akibat perbuatan seseorang suku mengakibatkan tuntutan pembalasan suku lain, bahkan kadang-kadang dipertanggungjawabkan kesalahan tersebut pada seluruh suku atau *clan* atau kampung. Sering suatu

⁷ Muhari Agus Santoso, 2002, ***Paradigma Baru Hukum Pidana***, Averroes Press, Malang, hal 19

⁸ Barda Nawawi Arief, 2010, ***Kebijakan hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”***, Kencana Prenada, Jakarta, hal 89

kampung menyerang kampung lain sebagai suatu pidana pembalasan.

(2) Penghapusan Dosa (*expiation*)

Dalam hal tujuan pembedaan dalam arti penebusan dosa pun merupakan suatu sejarah dalam peradaban manusia. Tujuan pembedaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religious. Pembedaan menurut tradisi Kristen-Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Dengan demikian terjadilah keseimbangan.

(3) Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenaran mengenai tujuan penjerakan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh Negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini akan membuat orang yang rasional berpikir tentang untung ruginya suatu perbuatan. Dasar pertimbangan untung ruginya suatu perbuatan ini merupakan hasil pemikiran ajaran kriminologi klasik di abad ke-18 untuk reformasi hukum pidana yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria. Perbuatan-perbuatan pidana dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

(4) Perlindungan Terhadap Umum (*protection of the public*)

Sistem pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara. Diperkirakan biaya isolasi penjahat tersebut dari masyarakat akan kurang sebanding dengan kerugian yang mungkin ditimbulkan jika ia dibiarkan bebas. Isolasi penjahat dari masyarakat ini juga tidak lebih berat daripada kemungkinan ia lebih jahat setelah ia hidup di penjara.

(5) Memperbaiki si Penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan oleh orang di jaman modern ini. Pidana itu harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang. Bagi para psikiatris hal tersebut dapat dicapai dengan jalan menciptakan program-program yang bersifat nasehat-nasehat kepada individu dalam kelompok dan menciptakan suatu *milieu* yang dapat menyembuhkan si penjahat. Bagi para sosiolog, maksud tersebut dapat dicapai dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan kerja keterampilan. Masih banyak orang yang membantah kegunaan

cara ini, karena bagaimana mungkin si penjahat dapat berubah menjadi lebih baik, jika masyarakat di mana ia hidup dan yang membentuk wataknya tidak berubah. Begitupula dengan keanekaragaman pandangan dan cara hidup yang masih terdapat pada suku bangsa.⁹

Dalam konteks pembedaan biasanya teori pembedaan dibagi dalam 3 golongan besar, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

(1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

(2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu

⁹ Andi Hamzah, 1987, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 47

pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.¹⁰

Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori-teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan (*dhoel-theorien*). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi (*prevensi*).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu *prevensi* khusus atau *special* dan *prevensi* umum atau *general*. Keduanya berdasar atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan pidana.

Dalam *prevensi* khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam *prevensi* umum diusahakan para oknumsemua juga takut menjalankan kejahatan.

Menurut teori relatif, maka dasar pembedaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pembedaan adalah menghindarkan (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat *prevensi* dari pembedaan ialah *prevensi* umum dan *prevensi* khusus.

¹⁰ *Ibid*, hal 28

Dalam prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feuerbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati. Akan tetapi, penakutan seperti itu bukanlah suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara, mereka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya. Yang menjadi keberatan terhadap teori prevensi umum seperti yang dikemukakan oleh Von Feuerbach adalah apakah sesuatu ancaman pidana itu sesuai atau tidak dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Ancaman pidana itu adalah sesuatu yang abstrak, sehingga sangat sukar untuk menentukan batas beratnya pidana yang akan diancamkan itu.¹¹

Sedangkan menurut teori prevensi khusus, maka tujuan pembedaan adalah menahan niat buruk pembuat, pembedaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melanggar perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

¹¹ Salmi, Akhiar, 1985, ***Eksistensi Hukuman Mati***, Aksara Persada, Jakarta.

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai. Sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa, sehingga selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana. Menurut Soedarto, keberhasilan pembinaan tersebut dapat dilihat dari besar kecilnya residivisme, artinya apakah orang yang telah dipidana dan mendapat perawatan atau pembinaan itu masih melakukan tindak pidana lagi atau tidak.

(3) Teori Gabungan

Apabila terdapat dua pendapat yang diametral berhadapan satu sama lain, biasanya ada suatu pendapat ketiga yang berada di tengah-tengah. Demikian juga disamping teori-teori absolute dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan (*vergelding*) dalam hukum pidana”. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsure memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.¹²

Teori gabungan dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

¹² Salmi,Akhlar,*Op.cit*.hal 33

- (a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat
- (b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- (c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Fillipe Gramatica berpendapat bahwa, hukum pidana harus diganti dengan sistem tindakan-tindakan perlindungan masyarakat. Istilah penjahat (*delinquent*), kejahatan (tindak pidana) dan pidana harus dibuang jauh-jauh. Tercelanya perbuatan tertentu harus diukur dengan berbahayanya si pembuat terhadap masyarakat dengan melihat perbuatannya (*antisozialitat*). Dan ini harus ditanggulangi dengan sistem tindakan, yang semata-mata bersifat prevensi special yang sesuai dengan kepribadian si pembuat dan bertujuan untuk sedapat mungkin mengintegrasikan orang yang telah mengabaikan masyarakat, kembali ke dalam masyarakat.

Naro Ancol yang menamakan alirannya atau gerakannya itu *defence sociale nouvollo* (perlindungan masyarakat yang baru) tidak

menghendaki sejauh Gramatica. Ia tidak bermaksud untuk menghapuskan istilah-istilah pidana, tindak pidana, dan penjahat, dan tidak ingin pula melenyapkan hukum pidana dengan menggantinya dengan sistem tindakan perlindungan masyarakat. Terhadap pembuat tindak pidana, gerakan ini menghendaki individualis dari pidana dan resosialisasi atau pemasyarakatan kembali. Pemidanaan diarahkan ke pembinaan dan pembinaan itu sendiri merupakan suatu bentuk umum untuk perlindungan masyarakat dan merupakan unsure yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan.

3. Jenis-jenis Pemidanaan

Mengenai jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim pidana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terpidana atau pelaku tindak pidana adalah :

(1) Pidana pokok, terdiri dari :

- (a) Pidana mati
- (b) Pidana penjara
- (c) Pidana kurungan
- (d) Pidana denda

(2) Pidana tambahan, terdiri dari :

- (a) Pencabutan hak-hak tertentu

(b) Perampasan barang-barang tertentu

(c) Pengumuman putusan hakim

Sedangkan jenis-jenis pidana pada Naskah Rancangan KUHP baru hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut :¹³

(1) Pasal 68

(a) Pidana pokok terdiri atas :

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana tertutup
- 3) Pidana pengawasan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana kerja social

(b) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

(2) Pasal 69

Pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus.

(3) Pasal 70

(a) Pidana tambahan terdiri atas :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu

¹³ Ketua MA:Pidana MATi Masih Hukum Positif di Indonesia, **Kompas**, 19 Februari 2003, hal 7

- 2) Perampasan barang-barang tertentu atau tagihan
 - 3) Pengumuman putusan hakim
 - 4) Pembayaran ganti kerugian
 - 5) Pemenuhan kewajiban adat
- (b) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat ditambahkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
- (c) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (d) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

Sejarah hukum modern Indonesia mencatat, karena berbagai persoalan yang muncul dan pemikiran yang berkembang, para ahli hukum dan politisi Indonesia menggugat untuk merevisi KUHP yang bukan *made in Indonesia*, tetapi benar-benar *made in Pemerintah Hindia Belanda* yang diberlakukan untuk kepentingan penjajahan, dan kemudian terus dipertahankan untuk kepentingan penguasa setelah kemerdekaan.

4. Prinsip Penjatuhan Pidana Menurut KUHP

Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stesel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri.

Menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih dahulu.

Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan system alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja.

Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif di mana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan diantara pasal-pasal KUHP terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancam tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batas-batas yang ditentukan Undang-undang.

Dalam KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan

yang jahat, dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik.¹⁴

B. Definisi dan Lahirnya Pidana Denda

Pidana berasal dari kata *Straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Denda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jadi, definisi dari pidana denda adalah suatu hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Penerapan pidana denda selalu dibayangi dengan penerapan pidana penjara yang telah mendapatkan tantangan dari berbagai kajian, penelitian dan pengalaman empiris, sehingga membuka pemikiran kearah berbagai pidana alternatif dari pidana kehilangan kemerdekaan.¹⁵

Dalam sejarahnya, pidana denda telah digunakan dalam hukum pidana selama berabad-abad. Anglo Saxon mula-mula secara sistematis

¹⁴ Niniek Suparni, 2007, ***Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, hal 21

¹⁵ Syaiful Bakhri, 2009, ***Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia***, Total Media, Yogyakarta, hal 131

menggunakan hukuman finansial bagi pelaku kejahatan. Pembayaran uang sebagai ganti kerugian diberikan kepada korban. Ganti rugi tersebut menggambarkan keadilan swadaya yang sudah lama berlaku yang memungkinkan korban untuk menuntut balas secara langsung terhadap mereka yang telah berbuat salah dan akibat terjadinya pertumpahan darah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ancaman terhadap kehidupan dan harta benda suatu kelompok yang ditimbulkan oleh pembalasan.

Korban adalah faktor penting dalam perkembangan dan popularitas hukuman dalam bentuk uang. Pidana denda itu sendiri sebenarnya merupakan pidana tertua dan lebih tua dari pada pidana penjara. Pembayaran denda terkadang dapat berupa ganti kerugian dan denda adat. Dalam zaman modern, denda dijatuhkan untuk delik ringan dan delik berat dikumulatikan dengan penjara. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.

Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil ganti kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya mengambil seluruh

pembayaran ganti rugi tersebut. Dalam hukum pidana, denda yang dibayarkan kepada Negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak bayar.

C. Perkembangan Pidana Denda di Indonesia

Pidana mati adalah suatu pidana yang ditujukan kepada jiwa orang, pidana penjara dan kurungan kepada kebebasan orang, sedangkan pidana denda tertuju kepada harta benda orang berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu. Diantara jenis-jenis pidana yang terdapat didalam KUHP (WvS) jenis pidana denda merupakan pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara pidana mati.

Sebelum menjadi sanksi yang mendukung sistem pemidanaan (KUHP), pidana denda telah dikenal secara luas hamper setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitive, walaupun dengan bentuknya yang primitive, dan tradisional Indonesia. Pada zaman kerajaan Majapahit, sanksi pidana denda biasanya dikenakan pada kasus-kasus penghinaan atau pencurian dan pembunuhan binatang peliharaan yang menjadi kesenangan raja. Dalam menetapkan besar atau kecilnya denda tergantung pada besar atau kecilnya kesalahan yang diperbuat, yaitu dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) berdasarkan kasta orang yang bersalah, dan kepada siapa kesalahan itu diperbuat.

- 2) berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena.
- 3) berdasarkan perincian anggota yang terkena.
- 4) berdasarkan berlakunya perbuatan.
- 5) berdasarkan niat orang yang berbuat salah.

6) berdasarkan jenis barang atau binatang yang menjadi objek perbuatan. Apabila denda tidak dibayar, maka orang yang bersalah harus menjadi hamba atau budak dengan menjalankan apa yang diperintahkan tuannya. Bila hutang benda dapat dilunasi maka setiap saat ia dapat berhenti menjadi hamba. Dan tidak berhak menetapkan berapa lama orang yang bersalah itu menghamba untuk melunasi hutang dendanya adalah raja yang berkuasa.

Pidana denda juga dikenal di beberapa masyarakat tradisional di Indonesia, misalnya di daerah Teluk Yos Sudarso (Irian Jaya) seorang yang melanggar ketentuan hukum adat dapat dikenakan hukuman sanksi antara lain membayar denda berupa bekerja untuk masyarakat⁵. Di Tapanuli, jika pembunuh tidak dapat membayar uang salah, keluarga yang terbunuh menyarankan untuk dijatuhi hukuman mati, maka pidana mati dilaksanakan⁶. Sedangkan di Minangkabau, dikenal hukum balas membalas, yaitu siapa yang mengucurkan darahnya. Hal ini menurut pendapat konservatif dari Datuk Ketemanggungan, eksekusi dilaksanakan di muka umum dengan cara ditikam.

D. Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Penjara

Tindak pidana kejahatan dalam KUHP pada umumnya diancam dengan pidana penjara. Dalam beberapa ketentuan di KUHP terdapat pula suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan atau denda tanpa dialternatifkan dengan pidana penjara. Pidana kurungan dan denda tersebut ada yang diancamkan secara tunggal dan ada yang secara alternatif. Kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda saja ditentukan dalam Pasal 403 yakni paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pidana tunggal dan pidana alternatif sebagai pengganti atau pilihan pidana penjara tidak signifikan dalam KUHP sehingga yang menonjol adalah ancaman pidana penjara.¹⁶

Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat penting. Setelah mengetahui tujuan pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada disekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana dimasa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

¹⁶ Suhariyono, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hal 316

Hakim dalam menerapkan pidana penjara disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya :

- Faktor usia si pembuat pidana
- Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali
- Kerugian terhadap korban

Ada sesuatu ketentuan bahwa dalam hal seseorang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, namun apabila hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan serta pedoman penerapan pidana penjara, maka hakim hakim dapat dijatuhkan pidana denda.

Disini sikap memilih pidana denda benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan obyektif dan praktis daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana penjara.

Ketentuan yang mengatur pidana denda ini dicantumkan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus

terpidana. Dengan begitu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayarnya.¹⁷

E. Pengaturan Pidana Denda di Indonesia

Rancangan KUHP, sebagai ancaman hukum nasional, banyak menjanjikan berfungsinya pidana denda yakni pidana denda ditentukan paling banyak berdasarkan kategori dan ditentukan pidana minimumnya; pidana denda untuk korporasi; pertimbangan kemampuan terpidana dalam penjatuhan pidana denda; pidana denda yang dapat dibayar secara mencicil dan jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diambil dari kekayaan atau dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara yang ditentukan berdasarkan perhitungan dan ukuran-ukuran tertentu; dan pidana pidana denda bagi anak yang melakukan tindakan pidana. Dalam hal terjadinya nilai uang, ketentuan pidana dalam RUU KUHP relative memadai dengan rincian, sebanyak 127 pasal ditentukan ancaman pidana penjara tunggal, 40 pasal ditentukan ancaman pidana.

Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat di angsur. Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut :

¹⁷ R.Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Permai, Jakarta, hal 189

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.
- b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - 1) Kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah
 - 2) Kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah
 - 3) Kategori III, tiga juta rupiah
 - 4) Kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah
 - 5) Kategori V, tiga puluh juta rupiah
 - 6) Kategori VI, tiga ratus juta rupiah
- c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - 1) Pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 15 tahun adalah denda kategori V.
 - 2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda kategori VI.
 - 3) Pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.¹⁸

¹⁸ Bambang Waluyo, 2008, Pidana Denda dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 20

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah dipegang ditangan.¹⁹

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.²⁰

Bertitik tolak pada judul yang Penulis angkat pada skripsi ini, maka Penulis melakukan beberapa metode penelitian yaitu :

A. Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang Penulis angkat pada skripsi ini, maka tempat dan lokasi penelitian yang Penulis lakukan adalah di Makassar. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 27

²⁰ Bambang Sunggono, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 29

B. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan yang relevan, yaitu antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literature, pandangan para pakar yang berkaitan dengan pidana denda, serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

- 1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan

membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung. Dalam hal ini, Penulis melakukan wawancara dengan akademisi dan juga praktisi hukum.

D. Analisis data

Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normative. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis (Soerjono Soekanto, 1986; 251). Teknik analisis data adalah suatu uraian tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya kualitatif. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sehingga kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan data, kemudian data direduksi sehingga diperoleh data khusus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk

kemudian dikaji dengan menggunakan norma secara materil atau mengambil isi data disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan akhirnya diambil kesimpulan / verifikasi sehingga akan diperoleh kebenaran obyektif.

Sesuai dengan jenis data yang deskriptif maka yang digunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

Dari penjelasan di atas, maka Penulis menganalisis data serta teori-teori yang telah ada untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana penerapan pidana denda di Indonesia, kemudian menjawab pertanyaan mengenai eksistensi pidana denda dalam pidana dan pembedaan di Indonesia.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pidana Denda dalam konteks Pemidanaan di Indonesia

Penetapan pidana denda dalam KUHP merupakan jenis sanksi pidana yang berbeda jumlah persentase dan ancaman jenis pidananya dengan RUU KUHP, baik pidana yang diancamkan sebagai alternative maupun pidana tunggal. Dari mulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan (Buku II) dan dari mulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran (Buku III), perumusannya adalah pidana penjara tunggal, pidana penjara dengan alternatif denda, pidana kurungan tunggal, pidana kurungan dengan alternatif denda, dan pidana denda yang diancamkan secara tunggal.

Minimum pidana denda adalah Rp.0,25 (dua puluh lima sen) x 15. Maksimumnya tidak ditentukan secara umum melainkan ditentukan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam Buku II dan III KUHP. Di luar KUHP adakalanya ditentukan dalam 1 atau 2 pasal bagian terakhir dari perundang-undangan tersebut, untuk norma-norma tindak pidana yang ditentukan dalam beberapa pasal yang mendahuluinya. Didalam KUHP sebelum dirubah pasal 303, maksimum denda yang tertinggi diancamkan terdapat dalam pasal 403, yaitu $Rp\ 10.000 \times 15 = Rp\ 150.000$ yang nota bene merupakan ancaman pidana tunggal. Maksimum pidana denda untuk

Pasal 303 setelah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah Rp 25 juta.

Untuk beberapa perundang-undangan hukum pidana, ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2 KUHP tidak diterapkan. Hal ini terutama ditentukan kepada penyelesaian tindak pidana dimana titik berat penyelesaiannya diharapkan untuk kelancaran pengisian kas Negara, memperbesar pendapatan Negara, dan pengembalian uang Negara.

Dilihat dari persentase penentuan pidana antara pidana penjara, alternative penjara dan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku II (dari Pasal 104 sampai Pasal 488), dapat dilihat dalam Tabel 1 dibawah ini

Tabel 1
Persentase Pidana Penjara, Penjara atau Denda, dan Denda Tunggal
(Buku II)

Penentuan Pidana	Persentase
Pidana penjara tunggal = 296 pasal	68,67 %
Alternatif pidana penjara atau denda = 133 pasal	30,85 %
Pidana denda tunggal = 2 pasal	0,45 %

Dilihat dari persentase penentuan pidana antara pidana kurungan, alternatif kurungan denda, serta denda tunggal, yang ditentukan dalam Buku III, dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini (Pasal 489 sampai Pasal 569):

Tabel 2

Persentase Pidana Kurungan, Kurungan atau Denda, dan Denda Tunggal
(Buku III)

Penentuan Pidana	Persentase
Pidana kurungan tunggal = 6 pasal	7,5 %
Alternative pidana kurungan atau denda = 34 pasal	42,5 %
Pidana denda tunggal = 40 pasal	50 %

Jika diperbandingkan dengan jumlah yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III mengenai bobot jenis pidana penjara, kurungan, dan denda tampak secara signifikan bahwa pidana penjara diutamakan untuk menghukum pelaku tindak pidana kejahatan.

Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp.3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak bayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama 6 bulan.

Dalam RUU KUHP, pidana denda betul-betul dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternative pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternative, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana.

Kritikan terhadap penjara, baik sebagai kebijakan penentuan pidana maupun dalam pelaksanaannya, membuat pidana denda kembali diperhatikan orang. Jika dilihat dari perkembangan sistem pidana di Indonesia, juga dibandingkan dengan perkembangan sistem pidana denda dinegara-negara lain, Indonesia dapat dikatakan Negara yang tertinggal dalam pengaturan dan penerapan pidana denda. KUHP yang berlaku di Indonesia itu sendiri memiliki kelemahan-kelemahan, antara lain:

- 1) Pidana denda dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana dan pada akhirnya tujuan pembedaan tidak tercapai.
- 2) Pidana denda lebih menguntungkan bagi orang mampu karena bagi mereka yang tidak mampu akan membebaninya dan mereka memilih untuk menerima jenis pidana perampasan kemerdekaan.
- 3) Adanya kesulitan pelaksanaan eksekusi pidana denda bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak dipenjara atau jika terpidana tidak bersedia membayar denda, terdapat kesulitan untuk melelang harta benda milik terpidana.

Di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pidana denda masih tetap sebagai bagian dari pidana pokok disamping pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Jenis pidana tersebut mendasarkan

pada konsep RUU KUHP 1993 dan tetap dipertahankan sampai dengan konsep (versi) 2006. Dalam penjelasan Pasal 80 RUU KUHP. Disebutkan bahwa pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak kalah efektif dengan jenis pidana lain.

Pola pidana denda yang ditentukan dalam RUU KUHP versi 2006/2008 disebutkan sebagai berikut:

1. Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
2. Jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
3. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
 - a. Kategori I Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kategori II Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kategori III Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Kategori V Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
4. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
5. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah pidana denda kategori V;
 - b. Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah pidana denda kategori VI.
- 6. Pidana denda paling sedikit untuk korporasi adalah pidana denda kategori IV.
 - 7. Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 8. Dalam penjatuhan pidana denda, wajib dipertimbangkan kemampuan terpidana.
 - 9. Dalam menilai kemampuan terpidana, wajib diperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatan.
 - 10. Ketentuan mengenai pertimbangan kemampuan terpidana tidak mengurangi untuk diterapkan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan untuk tindak pidana tertentu.
 - 11. Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam tenggang waktu sesuai dengan putusan hakim.
 - 12. Jika pidana denda tersebut tidak dibayar penuh dalam tenggang waktu yang ditetapkan, maka untuk pidana denda yang tidak

dibayar tersebut dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

13. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak memungkinkan, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut digantikan dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori I.

14. Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4),²¹
- b. Untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.²²

²¹ Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi: (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan; (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling lama: a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas; dan b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

²² Pasal 134 mengatur mengenai faktor-faktor memperberat pidana.

15. Perhitungan lamanya pidana pengganti didasar pada ukuran, untuk setiap pidana denda Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang, disepadankan dengan:

- a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti;
- b. 1 (satu) hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

16. Jika setelah menjalani pidana pengganti, sebagian pidana denda dibayar, maka lamanya pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.

17. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

18. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak dapat dibayar penuh, maka untuk korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.

Di samping pola, di dalam RUU KUHP juga diatur mengenai pedoman penerapan pidana. Jika tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54²³ dan Pasal 55²⁴ maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.

Jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut. Jika dalam menerapkan ketentuan tersebut, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77²⁵ dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2),²⁶ maka tetap dapat dijatuhkan pidana denda paling banyak separuh dari maksimum pidana denda yang diancamkan tersebut bersama-sama dengan pidana pengawasan.

²³ Pasal 54 mengatur mengenai tujuan pemidanaan yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

²⁴ Pasal 55 mengatur mengenai pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

²⁵ Pasal 77 mengatur mengenai pidana pengawasan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

²⁶ Pasal 78 mengatur mengenai pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya untuk waktu paling lama 3 tahun.

Dari pola atau pedoman pemidanaan pidana denda di atas, dapat diketahui bahwa pidana denda dalam RUU KUHP merupakan pembaruan dari ketentuan KUHP (lama), yakni:

- 1) Pidana denda ditentukan melalui pengkategorian;
- 2) Jika terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah;
- 3) Adanya pengaturan mengenai pertimbangan tentang kemampuan terpidana;
- 4) Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil;
- 5) Pidana denda dapat diganti dengan pidana kerja sosial, pengawasan, atau pidana penjara;
- 6) Pidana denda dapat dijatuhkan terhadap korporasi;
- 7) Untuk korporasi yang tidak dapat membayar denda secara penuh, diganti dengan pidana berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi.²⁷

Terkait dengan penentuan kategori, dalam konsep disebutkan bahwa tujuan utama penggunaan kategori denda adalah:

- a. Agar diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai tindak pidana;

²⁷ Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, 263.

- b. Agar mudah melakukan perubahan apabila terjadi perubahan keadaan ekonomi dan moneter di Negara kita.

Jika dibandingkan KUHP Indonesia dengan KUHP Belanda pada masa sekarang ini perbedaan itu semakin melebar. KUHP Belanda terus-menerus diubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi. Pada KUHP Belanda ancaman pidana semua delik ada alternative dendanya. Begitu pula adanya pasal sisipan, yaitu Pasal 9a, yang hakim dapat tidak menjatuhkan pidana, jika delik itu kecil artinya, keadaan pada waktu melakukan delik, begitu pula sesudahnya.

Sekarang ini sistem denda dalam KUHP Belanda sudah didasarkan kepada kategori, dari kategori satu sampai dengan enam. Dalam daftar kategori itu dicantumkan maksimum denda. Daftar kategori denda dicantumkan di dalam Buku I, yaitu Pasal 23. Jadi, pada setiap rumusan delik hanya menyebut ancaman pidana dendanya kategori berapa.

Sistem kategori ini sesuai dengan Negara yang inflasinya tinggi, karena jika denda sudah menjadi kecil seperti sekarang di Indonesia, maka cukup satu pasal yang diubah, yaitu yang mengatur daftar kategori denda dalam buku I KUHP. Barangkali ini pula yang menjadi pemikiran penyusunan RKUHP Indonesia yang mencantumkan sistem kategori denda dalam rancangan tersebut.

Perubahan paling mendasar pada KUHP Belanda pada tahun 1980-an ini ialah dicantumkannya alternatif denda pada semua perumusan delik, termasuk delik terhadap keamanan Negara, tidak terkecuali maker terhadap raja.

Suatu hal yang tidak kurang pentingnya untuk diketahui ialah asas di dalam ketentuan KUHP tidak dimungkinkan adanya kumulasi pidana penjara dan denda, telah diterobos oleh KUHP Belanda, yaitu pada delik pemalsuan dan perbuatan curang dimungkinkan kumulatif/alternative pidana penjara dan denda.

Di samping itu, perbandingan antara pidana penjara dan denda menurut ketentuan baru di dalam KUHP Belanda tidaklah berlaku simetris. Bukan berarti jika pidana penjaranya lebih tinggi maka alternative dendanya juga lebih tinggi. Ada hal-hal yang kelihatannya diselaraskan dengan efektivitas pidana denda itu. Misalnya, delik pencurian (Pasal 310), ancaman pidana penjaranya tahun dan dendanya kategori keempat. Dibandingkan dengan delik perbuatan curang (penipuan Pasal 326) yang ancaman pidananya maksimum 3 tahun, tetapi pidana dendanya kategori kelima. Jadi, ancaman pidana penjara pada delik pencurian lebih berat daripada delik penipuan, tetapi ancaman pidana dendanya lebih ringan.

B. Penerapan Pidana Denda di Pengadilan Negeri Makassar

Keputusan hakim sangat tergantung dari proses pembuktian dan keyakinan hakim dengan berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang diberikan dalam bentuk putusan yang sifatnya memaksa. Sebagaimana asas hukum dimana hakim berperan aktif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Pembuatan suatu putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak gampang sehingga memerlukan pelatihan pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Winarsih SH,MH (wawancara tanggal 20 Januari 2013) yang mengatakan bahwa :

Penjatuhan putusan pemidanaan merupakan hasil musyawarah dari majelis hakim. Mengenai ketentuan pidana materiil majelis hakim berpedoman dari dakwaan yang merupakan kewenangan jaksa

penuntut umum dan pengadilan tidak bisa melakukan intervensi. Pengadilan mempunyai tugas mengadili yaitu, menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Tabel 3
Data pidana denda di kota Makassar

Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan dan dijatuhi pidana denda
2010	18	15
2011	10	9
2012	11	11
jumlah	39	35

Sumber : Pengadilan Negeri Makassar 2013

Dilihat dari data diatas dapat kita lihat bahwa penerapan pidana denda di wilayah kota Makassar masih sangat minim. Hal itu disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Karena minimnya ancaman pidana denda kebanyakan hakim lebih sering memberikan pidana kurungan pengganti denda dari pada harus mengganti denda tersebut. Hal itu didorong dengan adanya faktor ekonomi , masih mudanya para terpidana dan para terpidana tersebut menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, disamping itu juga para hakim melihat dari sikap para terpidana selama proses persidangan apakah terpidana tersebut berlaku sopan atau tidak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang hakim Winarsih SH,MH (wawancara tanggal 20 Januari 2013) yang mengatakan bahwa :

Salah satu hal yang meringankan terdakwa adalah sikap sopan yang senantiasa ditunjukkan oleh terdakwa pada setiap mengikuti persidangan di pengadilan. Sikap tersebut sangat membantu kami sebagai seorang hakim dalam mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Pidana denda tidak terlalu banyak digunakan karena tidak semua kejahatan atau pelanggaran yang terdapat didalam KUHP dapat dikenakan pidana denda, hanya beberapa pasal saja yang hanya mencantumkan pidana denda didalamnya. Hal itulah yang menyebabkan sampai pada saat ini masih minimnya pidana denda yang dapat dijatuhkan. Didalam KUHP juga hanya 2 pasal yang betul-betul memiliki ancaman pidana denda tunggal dan 133 pasal sebagai alternative. Dilihat dari putusan hakim yang memberikan putusan pidana denda subsidair pidana kurungan, para terpidana cenderung untuk lebih menjalani pidana kurungan dari pada harus menjalani pidana denda. Hal itu tidak terlepas dari mengingatnya faktor ekonomi para terpidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana denda dalam pemidanaan di Indonesia belum maksimal. Pidana denda belum mempunyai fungsi dan peran yang maksimal karena pengak hukum cenderung memilih pidana penjara atau kurungan daripada pidana denda. Hal itu dikarenakan pidana penjara sampai saat ini masih lebih diutamakan dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum. Padahal perkembangan konsepsi baru dalam hukum pidana, yang menonjol adalah perkembangan mengenai sanksi alternatif yakni dari pidana hilang kemerdekaan ke pidana denda, terutama terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah satu tahun.
2. Penerapan pidana denda di Pengadilan Negeri Makassar masih sangat minim, hal itu dikarenakan masih dominannya penetapan pidana penjara atau pidana kurungan sebagai efek jera bagi pelaku. Belum lagi faktor-faktor yang mempengaruhi setiap putusan hakim. Yang paling menonjol

adalah faktor minimnya ancaman pidana denda yang membuat para hakim lebih memilih pidana penjara atau kurungan dibandingkan pidana denda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih mengefektifkan pidana denda sebagai penjeratan, perlu ditambahkan satu ketentuan dalam RUU KUHP bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim wajib dibayar sendiri oleh pelaku, dan disarankan agar pemerintah segera membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur mengenai penyesuaian nilai mata uang pada ancaman pidana denda yang ditentukan dalam KUHP.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum hendaknya tidak mengenyampingkan pidana denda dibandingkan pidana penjara atau pidana kurungan, karena pidana penjara atau pidana kurungan tidak selamanya memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A.Fuad Usfa, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM, Malang.
- Andi Hamzah, 1987, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2010, *Kebijakan hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *“Dari ‘TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN’ Menuju Kepada ‘TIADA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TANPA KESALAHAN’” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F.Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R.Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Permai, Jakarta.
- Salmi, Akhiar, 1985, *Eksistensi Hukuman Mati*, Aksara Persada, Jakarta.

Suhariyono AR, 2012, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

Sumber Internet

<http://sudiryona.wordpress.com/2012/05/27/sejarah-dan-perkembangan-pidana-denda/> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2012

http://syafiirahman.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_27.html Diakses pada tanggal 01 Oktober 2012

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2012

Sumber Artikel

Ketua MA: Pidana Mati Masih Hukum Positif di Indonesia, *Kompas*, 19 Februari 2003.